

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dan Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional dengan cara menganalisis data-data dan teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang menyangkut dengan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional.

2.1.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional

2.1.1.1 Pengertian Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan (KNKG, 2010).

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (L., Loina, 2003 :14).

Pada dasarnya prinsip transparansi merupakan sebuah prinsip keterbukaan yang memudahkan publik dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan organisasi, diantaranya yaitu informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang diperoleh. Adanya tuntutan objektivitas dalam suatu organisasi, dimana harus terdapat informasi yang material dan relevan yaitu dengan mudah diakses dan dipahami oleh muzaki (Fitrisia, 2011:175).

Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Badan Amil Zakat Nasional harus memberikan informasi keuangan dan pengelolaan kepada para muzaki dan donatur baik diminta maupun tidak, karena muzaki dan donatur mempunyai hak atas informasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang telah mereka bayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional tersebut. Prinsip transparansi juga merujuk pada sikap terbuka seseorang dalam hal ini amil kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, seraya tetap mencermati hak-hak dasar dan organisasi selaku unsur yang bekerja (Nasim, A., dan M. Rizqi, 2014:551).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan suatu organisasi/instansi mengenai kegiatan yang dilakukannya kepada berbagai pihak yang berkaitan untuk memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan artinya organisasi/instansi memberikan informasi secara terbuka kepada berbagai pihak yang berkaitan mengenai pengelolaan keuangan pada organisasi/instansi tersebut. Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional, pihak yang berkaitan diantaranya adalah dewan pengawas, pemerintah, muzaki dan donatur yang menitipkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional, serta masyarakat umum, hal ini karena Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

2.1.1.2 Transparansi dalam Perspektif Islam

Menurut Abu Tapanjeh (dalam Lia, Wihdiasmara F., 2019:12), konsep transparansi dalam Islam meliputi:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki dan donatur. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelola zakat, infak dan sedekah termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dari konsep transparansi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Menurut Nurhayati, N., et.al. (2014:579) menyatakan bahwa konsep transparansi dalam Islam harus memuat:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada publik.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dan dapat dibandingkan terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Informasi yang diberikan harus adil secara menyeluruh.

2.1.1.3 Prinsip Transparansi

L., Tundunaung, et.al. (2018:4), setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.1.1.4 Indikator Transparansi

Dalam Puzkas BAZNAS (2019:24) hasil penelitian menunjukkan indeks transparansi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indeks Transparansi pada Puskas BAZNAS

No.	Dimensi	Variabel	Indikator
1	Transparansi Keuangan	Publikasi Laporan Keuangan	Laporan Website
			Publikasi Media Massa
		Laporan Keuangan	Penggunaan Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA)
			Ketepatan Waktu Pelaporan
2	Transparansi Manajemen	Tata Kelola	Opini Auditor Independen
			Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar ISO
			Rencana Strategis
		Struktur Organisasi	Rencana Kerja Anggaran Tahunan
			Struktur Organisasi: Profil manajemen, profil member, sistem kepegawaian
			Portal Informasi dan Dokumentasi (PID)
3	Transparansi Program	Saluran Pengaduan	Ketersediaan Portal Informasi dan Dokumentasi Publik (PID)
			Terdapat Sistem Saluran Pengaduan
3	Transparansi Program	Aktivitas <i>Real-time</i>	Aktivitas Penghimpunan (<i>Real-time</i>)
			Aktivitas Penyaluran (<i>Real-time</i>)
		Database Muzaki & Mustahik	Database Muzaki Individu
			Database Muzaki Badan
			Database Mustahik
Data Program Penghimpunan dan Penyaluran	Data Penghimpunan		
	Data Penyaluran		

(Sumber: Puzkas BAZNAS 2019)

Secara umum, dalam Indeks Transparansi OPZ terdapat 3 dimensi utama, 9 variabel dan 18 indikator yang menjadi komponen pengukuran dalam indeks. Tiga indikator yang menjadi komponen penyusun indeks adalah dimensi transparansi keuangan, dimensi transparansi manajemen dan dimensi transparansi program.

Menurut L., Loina (2003:16) indikator transparansi dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab,
2. Kemudahan akses informasi,
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap,
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim, A. (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodeik (KNKG, 2010). Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk sejauh mana strategi pengelola lembaga untuk mempertanggungjawabkan program kerja dan kebijakan yang telah dijalankan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance*. Akuntabilitas dimaknai dengan kewajiban suatu organisasi memberikan pertanggungjawaban atau memaparkan terkait dengan laporan keuangan, kinerja dan tindakan yang dilakukan (Hamidi, N., dan Suwardi E., 2013:14).

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan agar setiap pengelola suatu organisasi dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemegang amanah kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan artinya pemegang amanah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah terkait dengan pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan kepadanya. Semua organisasi termasuk BAZNAS dituntut untuk akuntabel dengan memaparkan semua aktivitasnya dalam mengelola setiap dana yang diterima, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat yang harus diberikan hanya kepada golongan yang berhak menerimanya, juga terkait dengan penyaluran dana infak dan sedekah.

2.1.2.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Aswiyah (2019:24) mengemukakan, menurut perspektif islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 30 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran.

Dalam islam, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Sang Pencipta, karena apa yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah

dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan dan perbuat.

Teori akuntabilitas islam sesuai dengan implementasi akuntansi zakat. Teori tersebut menjelaskan bentuk pertanggungjawaban utama adalah Allah SWT (akuntabilitas vertikal), selanjutnya pertanggung jawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal).

Menurut Astuti, S., & Asrori. dalam Lia, Wihdiasmara F. (2019:9), ada dua tingkatan akuntabilitas islam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Tingkat pertama atau akuntabilitas vertikal menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dan semua manifestasinya adalah milik Allah SWT (Q.S. 2: 282, Q.S. 42: 4) dan manusia ditunjuk oleh Allah untuk terlibat di dalamnya (Q.S. 33: 82), sementara otoritas tertinggi masih berada di tangan Allah. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban amil zakat kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu caranya. Menempatkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi merupakan inti dari konsep akuntabilitas vertikal. Sehingga tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran tanggungjawab pada Allah SWT. Hal ini berhubungan dengan pengumpulan dana, pengelolaan dana, serta penyaluran dana apakah telah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum.

2. Akuntabilitas Horizontal

Tingkat akuntabilitas kedua atau akuntabilitas horizontal adalah tanggungjawab sekunder yang mencakup pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan, pada tingkat ini dijelaskan bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada pribadian kepentingan kelompok. Akuntabilitas horizontal menciptakan kesadaran yang konstan dalam Akuntan Islam, dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab kepada Allah SWT atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, akuntan harus transparan dan harus berusaha memberikan laporan keuangan secara andal dan informasi yang akurat dan objektif. Inti dari akuntabilitas horizontal

yang menjadi dasar yaitu berkaitan dengan tanggungjawab kepada manusia dan alam.

2.1.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2013:9)):

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyarakatkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi mal-praktek dan mal-administrasi.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa

program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2013:9) dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses.
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.
3. Akuntabilitas program
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakana.
 - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
 - b. Mempertimbangkan dampak di masa depan.

Menurut Mahlel (2017:13), indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilaksanakan secara adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

2.1.3 Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional

Menurut Jogiyanto (2007:397) kepercayaan adalah penilaian seorang individu setelah memperoleh, memproses, dan mensintesis informasi dan menghasilkan berbagai penilaian dan anggapan. Menurut Inayah (2018:20) kepercayaan merupakan bentuk penilaian atas kredibilitas pihak yang diberi amanah atas kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Sumarwan, U. (2011:165-166) kepercayaan konsumen adalah pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen mengenai suatu objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan dinilai sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidak pastian.

Donney Patricia M. and Joseph P. Canon dikutip oleh Fadilah, et.al. (2012:130) pada literatur tentang kepercayaan menyarankan, bahwa keyakinan pada pihak yang mendapat kepercayaan adalah reliabel dan integritas tinggi, disertai dengan kualitas yang konsisten, kompeten, jujur, bertanggungjawab dan baik. Kepercayaan konsumen tidak hadir begitu saja, tetapi dari proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Dalam proses terbentuknya kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti reputasi organisasi, besar atau kecilnya organisasi, saling menyenangkan antara konsumen dengan organisasi maupun antara konsumen dengan karyawan organisasi.

Kepercayaan donatur terhadap yayasan diartikan sebagai tingkat keyakinan bahwa donatur telah menyumbangkan sumber dayanya dengan tepat, yang akan menguntungkan bagi donatur itu sendiri dan bagi yayasan dalam mencapai

tujuannya (Maulidiyah dan Darno, 2019:2). Kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan. Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap seseorang dalam hubungan.

Kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional dapat didefinisikan sebagai kemauan muzaki dan donatur untuk mengandalkan organisasi pengelola zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang amil (Aswiyah, 2019:16). Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.

Pada umumnya, aspek yang digunakan untuk mengukur kepercayaan muzaki terhadap Organisasi Pengelola Zakat menurut Mustafa, Mohamad, dan Adnan (2013:24) yaitu:

1. Keyakinan terhadap kredibilitas organisasi pengelola zakat
2. Keyakinan terhadap profesionalisme organisasi pengelola zakat
3. Organisasi pengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah

Kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional dapat dilihat dari seberapa tingginya keinginan masyarakat untuk memberikan dana zakat maupun infak/sedekahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional terkait. Masyarakat akan lebih mudah untuk percaya kepada suatu lembaga apabila lembaga tersebut dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian oleh B. Septi, et.al. (2019:111) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Akuntabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan membayar zakat. Juga transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Kepercayaan dapat ditentukan melalui tingkat kredibilitas suatu lembaga dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh lembaga.

Athifah, Ai Nur dan Efri (2018:72) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan, karena pertanggung-jawaban semakin baik ketika mampu disampaikan secara terbuka kepada publik. Sedangkan secara parsial atau terpisah, hanya variabel transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai signifikansi yang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur.

Hasil penelitian Delsie, Yusri dan Dwi. (2018:8) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki, transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Sementara penelitian oleh N. Eha (2019:183) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki, namun tidak berpengaruh positif terhadap komitmen muzaki. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen muzaki.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas, et.al. (2020:121) menyatakan bahwa transparansi pada lembaga amil zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Semakin transparan Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat dalam mengelola keuangan dan zakat, maka muzaki semakin yakin untuk memberikan dananya yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Secara akuntabilitas lembaga amil zakat dompet amanah umat tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat karena lembaga tidak mampu mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, M., dan Ataina H. (2019:49) menunjukkan bahwa akuntabilitas secara positif mempengaruhi kepercayaan kognitif. Kepercayaan afektif dan kognitif secara positif mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Kepercayaan kognitif berdampak positif pada minat muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga

zakat. Sementara penelitian oleh Nurul, Z. dan Lik A. (2020:101) menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga berpengaruh terhadap kepercayaan donatur dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan donatur.

Maulidiyah dan Darno (2019:8) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Secara parsial terdapat nilai hubungan antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur. Secara simultan terdapat nilai hubungan yang tinggi/kuat antara transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai prediksi mengenai tingkat kepercayaan donatur pada waktu mendatang.

Saripah (2019:57-59) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan dan variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi.

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Dina Fitriasia Septiarini (2011) Judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel Y Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Transparansi informasi dan akuntabilitas organisasi secara bersama-sama mempengaruhi dengan pengaruh positif terhadap	AKRUAL Vol. 2, No.2 E-ISSN 2502-6380

				pengumpulan zakat, infak dan <i>shoadaqoh</i> pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya.	
2	Elis Mediawati dan Sri Maryati (2012) Judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	- Kualitas Pelayanan Laporan Keuangan -Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZ tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat, ada faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi, seperti faktor lingkungan sekitar tempat tinggal dan promosi yang dilakukan oleh LAZ.	Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI Vol. 4, No.2 ISSN 2086 - 2563
3	Lu'liyatul Mutmainah (2015) Judul <i>TheInfluence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat</i>	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	-Variabel X tambahan Tanggung Jawab Lembaga Zakat -Variabel Y Niat Membayar Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat niat membayar zakat Secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah, namun tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap niat membayar zakat	<i>Global Review of Islamic Economics and Business</i> Vol. 3, No.2 ISSN 2338-7920

				di DPU DT Yogyakarta.	
4	Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah (2016) Judul Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	-Variabel X tambahan Kepuasan Muzaki -Variabel Y Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Secara simultan, kepuasan muzaki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzaki LAZ Rumah Zakat. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif terhadap loyalitas muzaki LAZ Rumah Zakat. Secara parsial, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas muzaki LAZ Rumah Zakat.	Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7, No.2 P- ISSN2085- 3696 E- ISSN2541- 4127
5	Irman Firmansyah dan Abrista Devi (2017) Judul <i>The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia</i>	Terdapat penjelasan dan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat	Berfokus pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip GCG. Untuk memperoleh transparansi, lembaga zakat harus membuat standar laporan keuangan yang diikuti dengan transparansi dalam penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Untuk	<i>International Journal of Zakat</i> Vol.2, No. 2 ISSN 2548- 2335

				memperoleh akuntabilitas, lembaga zakat harus meningkatkan efektivitas pengendalian intern, diikuti dengan pengukuran kinerja, dan kepatuhan keterampilan manusia dengan deskripsi pekerjaan.	
6	Athifah, Ai Nur Bayinah dan Efri Syamsul Bahri (2018) Judul Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara.	-Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi - Variabel Y Kepercayaan	- Laporan Keuangan - Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Secara simultan atau bersama-sama, variabel akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan, karena pertanggungjawaban semakin baik ketika mampu disampaikan secara terbuka kepada publik. Sedangkan secara parsial atau terpisah, hanya variabel transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai signifikansi yang tidak berpengaruh	Perisai <i>Islamic Banking and Finance Journal</i> Vol. 3, No.2 ISSN 2503-3077

				terhadap kepercayaan donatur.	
7	Cut Delsie Hasrina, Yusri, dan Dwi Rianda Agusti sy (2018) Judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.	-Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi - Variabel Y TingkatKepercayaan	- Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki, namun variabel transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki.	Jurnal Humaniora, Vol. 2, No.1 ISSN 2548-9585
8	Hani Tahliani (2018) Judul <i>Contribution of Good Governance Principles to Strengthening Zakat Management in Indonesia: Confirmatory Factor Analysis</i>	Terdapat penjelasan dan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat	Bersokus pada penerapan GCG dan analisis faktor konfirmatori	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Transparansi berkontribusi sebesar 60,4% pada tata kelola yang baik lembaga zakat, sementara akuntabilitas hanya berkontribusi sebesar 4,82%.	<i>International Journal of Zakat</i> Vol.3, No. 3 ISSN 2548-2335
9	Eha Nugraha (2019) Judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga	Variabel X Akuntabilitas Dan Transparansi	-Variabel X tambahan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat -Variabel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan	Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol.13,

	Pengelola Zakat Terhadap Komitmen Muzaki: Kepercayaan Muzaki Sebagai Variabel Intervening		YKomitmen Muzaki: Kepercayaan Muzaki Sebagai Variabel Intervening	muzaki, namun tidak berpengaruh positif terhadap komitmen muzaki. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen muzaki.	No.2 ISSN 1978-4392
10	M Fahmi, dan Ataina H. (2019) Judul <i>The Influence Of Accountability, Transparency, And Affective And Cognitive Trusts On Interest In Paying Zakat</i>	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel Y Kepercayaan afektif dan kognitif bunga membayar zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Akuntabilitas secara positif mempengaruhi kepercayaan kognitif. Kepercayaan afektif dan kognitif secara positif mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Kepercayaan kognitif berdampak positif pada minat muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 23, No.1 P-ISSN 1410-2420 E-ISSN 2528-6528
11	Prabowo Yudo Jayanto dan Siti Munawaroh (2019) Judul <i>The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession</i>	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	-Variabel X tambahan Reputasi, Religiositas dan Kepercayaan Pada Bunga Membayar Zakat Profesi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Reputasi, transparansi laporan keuangan, religiositas, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bunga dalam membayar zakat	Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 11, No.1 P-ISSN 2085-4277 E-ISSN 2502-6224

				profesi, tetapi akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap bunga dalam membayar zakat profesi.	
12	Nikmahtul Maulidiyah dan Darno (2019) Judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Sosial Keagamaan	-Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi - Variabel Y Kepercayaan	- Laporan Keuangan - Yayasan Sosial Keagamaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan donatur di Yayasan Sosial Keagamaan Cangkir Yadufa. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai prediksi mengenai tingkat kepercayaan donatur di Yayasan Sosial Keagamaan Cangkir Yadufa pada waktu mendatang.	Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 1, No.1 ISSN 2715-1212
13	Ziana Nurul Walidah dan Lik Anah (2020) Judul Pengaruh Akuntabilitas Lembaga dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (Laz-Uq) Jombang	-Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi - Variabel Y Kepercayaan	-Donatur Lembaga Amil Zakat Ummur Quro (LAZ-UQ) Jombang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Akuntabilitas lembaga berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Transparansiber pengaruh signifikan terhadap kepercayaan donatur.	JFAS : <i>Journal of Finance and Accounting Studies</i> Vol. 2,No.2 ISSN 2723-7761

14	Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, Moh. Takwil (2020) Judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakidi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat	Variabel X Akuntabilitas dan Transparansi	-Variabel X tambahan IGCG -Variabel Y Tingkat Kepercayaan Muzakidi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Transparansi pada Lembaga Amil Zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Semakin transparan Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat dalam mengelola keuangan dan zakat, maka muzaki semakin yakin untuk memberikan dananya yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Secara akuntabilitas lembaga amil zakat dompet amanah umat tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat karena lembaga tidak mampu mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan.	AKUNTAN SI: Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 6, No.2 P-ISSN 2502-5376 E-ISSN 2715-0658
----	---	---	---	--	--

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai belum transparannya pengelolaan keuangan serta kurangnya akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengelolaannya, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Badan Amil Zakat Nasional" untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap BAZNAS Kabupaten Ciamis.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat kepada suatu badan/lembaga/organisasi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan organisasi pengelola zakat. Dalam pengelolaan zakat, terdapat prinsip-prinsip yang mengaturnya, diantaranya adalah Prinsip-prinsip Pokok Zakat (PPZ) dan PSAK No. 109 yang mengatur mengenai akuntansi syariah zakatnya. Pada PPZ 8 membahas terkait Tata Kelola Amil Zakat, PPZ 16 membahas tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal (akuntabilitas), dan PPZ 17 membahas tentang Pengungkapan dan Transparansi.

Laporan keuangan merupakan kebutuhan semua organisasi, terutama bagi BAZNAS karena merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mengelola dana dari masyarakat secara langsung. Umumnya masyarakat terutama muzaki dan donatur tidak sepenuhnya memerlukan laporan keuangan karena mereka tidak memberikan dana zakat dan infak/sedekahnya untuk mendapatkan imbalan. Namun, masyarakat secara umum terutama muzaki dan donatur tentu ingin mengetahui mengenai pengelolaan keuangan terkait dana yang telah mereka titipkan, terutama mengenai penyaluran dana tersebut. Selain itu, BAZNAS juga memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pemerintah terkait.

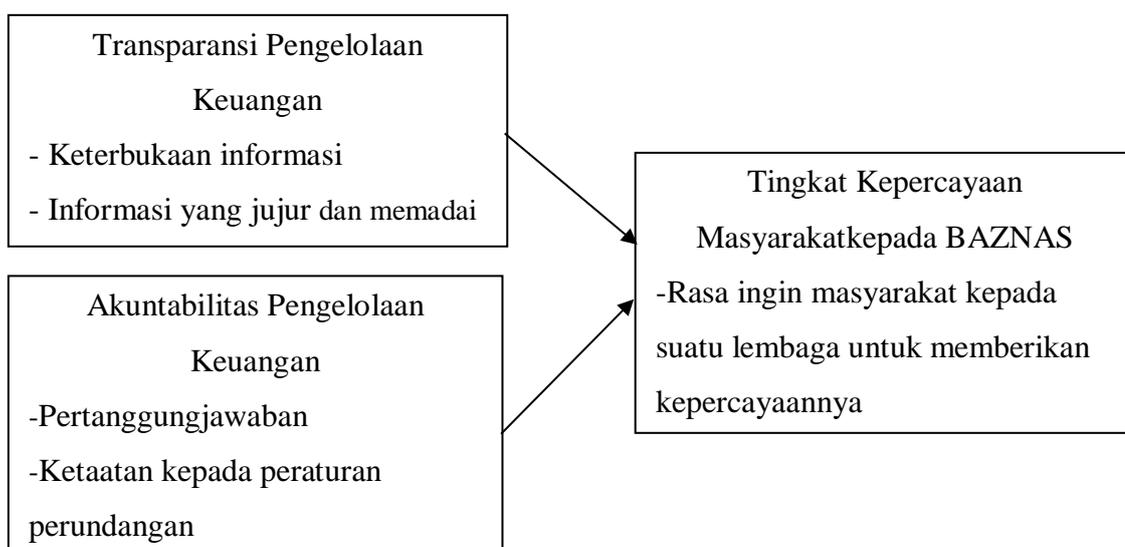
Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur serta memadai kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan (KNKG, 2010). Dalam hal ini,

transparansi mengenai laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS didasarkan pada kelayakan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada pemerintah terkait pengelolaan lembaga yang sudah dilakukan. Pada PPZ 17, transparansi harus diterapkan oleh lembaga zakat agar penilaian yang wajar dapat diberikan oleh masyarakat terkait dengan aspek penyelenggaraan zakat. K. Penny (2014:2) menyatakan bahwa pelaporan secara transparan kepada publik perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengelola BAZNAS yang ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu transparansi dan kepercayaan masyarakat memiliki hubungan searah (positif). Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan yang memadai maka kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS diharapkan akan meningkat. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Athifah, Ai Nur dan Efri (2018), Nurul, Z. dan Lik A.(2020), dan Ilyas, et.al. (2020).

Menurut Halim, A. (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam hal ini, akuntabilitas atau pertanggungjawaban didasarkan pada kelayakan muzaki dan donator untuk mengetahui pengelolaan atas dana atau amanah yang sudah diberikan kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola. Pada PPZ 16 diuraikan mengenai pentingnya akuntabilitas, pelaporan keuangan dan audit eksternal yang harus dilakukan. Akuntabilitas adalah unsur penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak eksternal. K. Penny (2014:2) menyatakan bahwa pemerintah atau organisasi dalam hal ini BAZNAS, yang secara akuntabel dalam kinerjanya akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat yang dilayaninya dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat memiliki hubungan searah (positif). Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS akan meningkat. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Delsie, Yusri dan Dwi (2018), Eha Nugraha (2019), dan Fahmi, M., dan Ataina H. (2019).

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dan cenderung tidak terpisahkan. Transparansi merupakan aspek yang penting dalam pelayanan publik untuk menunjukkan akuntabilitas sebuah organisasi kepada masyarakat. Menurut K. Penny (2014:2), kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik, dalam hal ini pengelolaan BAZNAS sebagai salah satu lembaga publik yang melayani masyarakat. Oleh karena itu transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kepercayaan masyarakat memiliki hubungan searah (positif). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS akan meningkat. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriasia (2011), Athifah, Ai Nur dan Efri (2018), Delsie, Yusri dan Dwi (2018), serta Maulidiyah dan Darno. (2019).

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, BAZNAS dinilai dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap dana yang dihimpun dan memenuhi keinginan masyarakat untuk mengetahui kegiatan pendistribusian yang dilakukan melalui informasi yang diperoleh. Selain itu dengan adanya pelaporan pengelolaan keuangan dari BAZNAS yang dapat diperoleh dan diakses dengan mudah oleh masyarakat dapat menjadialah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS terkait.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar Kerangka Pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Transparansi Laporan Keuangan sebagai X_1 dan Akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai X_2 yang akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada BAZNAS sebagai Y baik secara parsial maupun simultan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu perumusan masalah dalam penelitian, karena jawaban tersebut baru didasarkan pada teori yang relevan namun belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2017:159). Hipotesis digunakan untuk menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- H_1 : Transparansi pengelolaan keuangan berhubungan signifikan dengan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
- H_2 : Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
- H_3 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
- H_4 : Transparansi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki hubungan yang signifikan secara simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.